

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

LAPORAN MONITORING
CAPAIAN KINERJA

LMek

TRIWULAN III
2019



MOHAMAD RISAL WASAL. ATD., MM

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juni 1967. Menempuh pendidikan D IV Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S2 Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen dan menjabat sebagai Direktur Prasarana Transportasi Jalan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



AHMADI ZB, ATD, SE, MM

Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan



Lahir di Demak, 13 Mei 1966. Menempuh Pendidikan D.IV Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan S1 Transportasi di STMT Trisakti kemudian S2 Manajemen di STMT Trisakti. Menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



IR. MULYAHADI, MSTr

Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor

Lahir di Sidoarjo, 27 Februari 1966. Menempuh Pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Merdeka Malang lalu melanjutkan S2 Transportasi di Institut Teknologi Bandung dan saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



Drs H. HASAN BISRI

Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda



Lahir di Mojokerto tanggal 18 Agustus 1968. Menempuh Pendidikan D.III LLAJ di STTD Bekasi lalu melanjutkan S1 Administrasi di STIA LAN. Menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sejak 12 Desember 2019 sampai dengan saat ini.

SUSANTY PERTIWI,S.S, M.Hum

Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana

Lahir di Kota Makassar pada tanggal 20 Juli 1974. Menempuh pendidikan S1 Sastra Inggris di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang lalu meneruskan Pendidikan S2 Jurusan Hukum di Universitas Gajahmada (UGM) Yogyakarta dan menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



SUDARMAJI, SAP.,MM



Kasubbag Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Lahir di Kota Jakarta Timur pada tanggal 14 Agustus 1972. Menempuh pendidikan D3 Manajemen Informatika di Universitas Gunadarma lalu meneruskan S1 Ilmu Administrasi Negara di STIAM I Jakarta lalu meneruskan Pendidikan S2 Manajemen SDM di Sekolah Tinggi Manajemen IMMI Jakarta dan menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan saat ini.



SUHENDRO WAGIONO, ST, MMTr

Kepala Seksi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan



Lahir di Tulungagung pada tanggal 01 Mei 1971. Menempuh pendidikan S1 Teknik Planologi ITB Bandung lalu meneruskan Pendidikan S2 Manajemen Transportasi Darat di STMT Trisakti Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Seksi Rancang Bangun Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.

DODY ARIFANTO, ST., MMTr.

Kepala Seksi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan

Lahir di Jayapura pada tanggal 03 Agustus 1982. Menempuh pendidikan D.III LLAJ di STTD Bekasi kemudian S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Budi Utomo lalu meneruskan Pendidikan S2 Manajemen Transportasi Darat di STMT Trisakti Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Terminal, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan saat ini.



TEGUH ILMAN SANTOSO, Amd LLAJ., ST., M.Sc

Kasi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor

Lahir di Pemalang pada tanggal 13 Maret 1982. Menempuh pendidikan D.III Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S1 Teknik Sipil di Universitas Budi Utomo Jakarta kemudian S2 Sistem dan Teknik Transportasi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan menjabat sebagai Kasi Rancang Bangun Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



ANJAR HERMAWAN, S.Kom, MT

Kepala Seksi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor



Lahir di Tangerang pada tanggal 10 Desember 1982. Menempuh pendidikan S1 Teknik Informatika Universitas Budi Luhur Jakarta lalu meneruskan Pendidikan S2 Transportasi di Institut Teknologi Bandung dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Penimbangan Kendaraan Bermotor sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan saat ini.

ASTRI WIDIANI, A.Md LLAJ, SE

Kasi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Lahir di Tegal pada tanggal 06 Juli 1974. Menempuh pendidikan D.III Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S1 Manajemen Transportasi Darat di STMT Trisakti Jakarta dan menjabat sebagai Kasi Fasilitas Pendukung, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



LUKMAN AL AMIN, ST, M.Sc

Kasi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Lahir di Malang pada tanggal 24 Januari 1981. Menempuh pendidikan D.III LLASDP di STTD lalu meneruskan Pendidikan S1 Teknik di Universitas Mercubuana Jakarta kemudian S2 Teknik Transportasi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan menjabat sebagai Kasi Integrasi Moda, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



DIANA SEPTI RAHAYU, SE, MT

Kasi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana



Lahir di Sidoarjo pada tanggal 03 September 1983. Menempuh pendidikan D.III LLASDP di STTD kemudian S1 Manajemen di STIE ANINDYAGUNA Semarang lalu meneruskan Pendidikan S2 Transportasi di Institut Teknologi Bandung dan menjabat sebagai Kasi Penyelenggaraan Kemitraan, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.

RIZKI FAUZI RAHMAN, S.SiT, M.Si

Kasi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana

Lahir di Kota Palembang pada tanggal 27 Januari 1989. Menempuh pendidikan D.IV Transportasi Darat di STTD Bekasi lalu meneruskan Pendidikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Langlang Buana Bandung dan menjabat sebagai Kasi Pengawasan dan Evaluasi, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan saat ini.



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan III Tahun Th 2019 setiap tahun. Tulisan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab sebagai wujud akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini telah berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nornor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dimana dalam laporan ini mencakup:

- a) Perencanaan dan perjanjian kerja, yang merupakan langkah awal untuk pengukuran kinerja instansi pemerintah;
- b) Akuntabilitas Kinerja, yang memuat pengukuran kinerja kegiatan tahun 2019.

Dengan selesainya Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) TW III Tahun 2019, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ini, diharapkan dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban atas berbagai pelaksanaan kegiatan dan dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintah pada tahun-tahun mendatang serta sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Jakarta, 16 Oktober 2019

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD., MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19670608 199003 1 005

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ihtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. LAKIP merupakan hasil integrasi dan sinergi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain di dalam suatu Instansi Pemerintah, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di lingkungan masyarakat yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan. Manfaat yaitu manfaat yang didapat karena kegiatan belanja tersebut dilaksanakan serta Dampak yaitu dampak yang dihasilkan karena pelaksanaan suatu kegiatan belanja.

Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat yang didapat dari penyusunan suatu LAKIP yaitu evaluasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terhadap instansinya sendiri sehingga pimpinan instansi tersebut dapat mengevaluasi kinerja dari instansi yang dipimpinnya selama 1 tahun anggaran.



1.2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

1.2.1. Tugas dan Fungsi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana Transportasi Jalan:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- b) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- c) penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasimoda, dan kepengusahaan prasarana;
- d) penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana;
- e) penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan, penimbangan kendaraan bermotor, fasilitas pendukung dan integrasi moda, dan kepengusahaan prasarana; dan
- f) penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan,kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terdiri atas:

1. Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan;
2. Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
3. Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda;
4. Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana; dan
5. Subbagian Tata Usaha.



Tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sub bagian dan kelompok jabatan adalah sebagai berikut :

➤ **Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan**

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang terminal angkutan jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- c) Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan;
- d) Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan; dan



- e) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, rehabilitasi, pengoperasian atau penutupan, rancang bangun, pengelolaan data dan informasi terminal tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal penumpang angkutan jalan.

Subdirektorat Terminal Angkutan Jalan terdiri atas :

- a. **Seksi Rancang Bangun Terminal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi dan kelas terminal, rencana induk terminal, pembangunan, rancang bangun terminal penumpang tipe A dan terminal barang, serta bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi atau peningkatan terminal penumpang tipe B dan tipe C.
- b. **Seksi Pengelolaan Terminal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian, penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi terminal penumpang tipe A dan terminal barang, persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri, serta kompetensi sumber daya manusia bidang terminal angkutan jalan.

➤ **Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor**

Subdirektorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang Prasarana penimbangan kendaraan bermotor.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud, Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor,
- c. penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;



- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di jalan.
- e. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasaran Penimbangan Kendaraan Bermotor, penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotordi jalan serta kompetensi petugas Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor; dan
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan, pembangunan, penetapan pengoperasian dan/atau penutupan Unit, pengoperasian, dan pemeliharaan, rencana induk Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor penentuan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraaan Bermotor di jalan serta kompetensi petugas pelaksana Penimbangan Kendaraaan Bermotor di jalan serta.

Subdirektorat Penimbangan Kendaraan Bermotor terdiri atas :

- a. **Seksi Rancang Bangun** Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, penetapan lokasi, penetapan kelas, rancang bangun, serta pembangunan unit penimbangan kendaraan bermotor.
- b. **Seksi Pengelolaan** Penimbangan Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengoperasian atau penutupan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, pengelolaan data dan informasi, serta kompetensi sumber daya manusia bidang penimbangan kendaraan bermotor.

➤ **Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda :**

Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pendukung dan integrasi moda.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda;



- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda; dan
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan fasilitas pendukung dan integrasi moda.

Subdirektorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi moda atas :

- a. **Seksi Fasilitas Pendukung** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan fasilitas pendukung.
- b. **Seksi Integrasi Moda** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan teknis, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, pemeliharaan, rancang bangun, pengelolaan data informasi, serta bantuan teknis pembangunan, rehabilitasi dan peningkatan integrasi moda.

➤ **Subdirektorat Kepengusahaan**

Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud, Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana menyelenggarakan fungsi:



- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan; dan
- e. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, kerja sama kemitraan, pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana terdiri atas:

- a. *Seksi Penyelenggaraan Kemitraan* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana, pembiayaan dan pengoperasian, serta kerja sama kemitraan kepengusahaan prasarana transportasi jalan.
- b. *Seksi Pengawasan dan Evaluasi* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, serta pengelolaan data dan informasi kepengusahaan prasarana transportasi jalan.

➤ **Subbagian Tata Usaha**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

1.3. Sumber Daya Manusia Unit Kerja

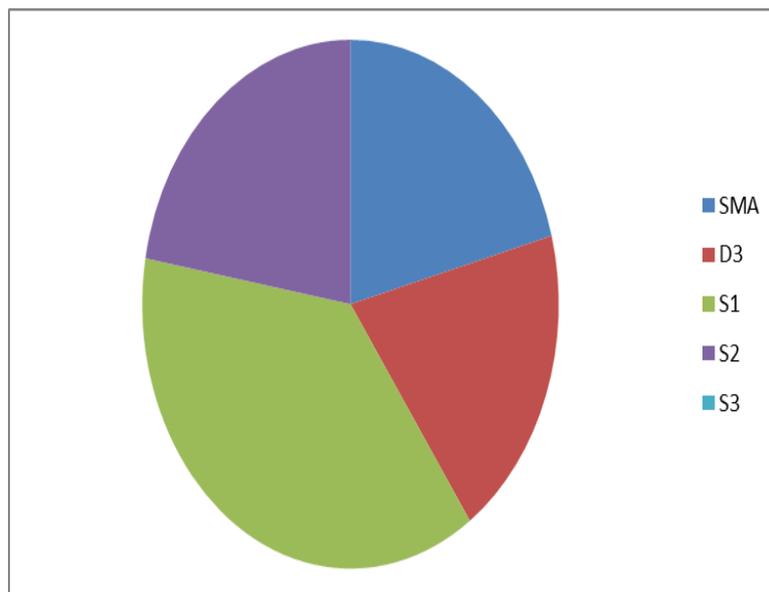
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan saat ini sumber daya manusia yang tersedia yaitu 27 orang PPNPN dan 52 orang ASN dengan total pegawai 79 orang. Jumlah Pegawai ASN Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dilihat pada tabel.



Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berdasarkan klasifikasi pendidikan terakhir terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	SMA	D3	S1	S2	S3
1	Direktur				1	
2	Subdit Terminal Angkutan Jalan	1	4	5	6	
3	Subdit Penimbangan Prasarana Kendaraan Bermotor	2	4	7	3	
4	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	2	2	6	2	
5	Subdit Kepengusahaan Prasarana	2	2	4	3	
6	Subag Tata Usaha	8	2	5	1	



Gambar : Diagram Berdasarkan Golongan Pendidikan

No.	Golongan	2019
1.	Golongan IV	6
2.	Golongan III	34
3.	Golongan II	12
4.	Golongan I	0
5.	Lainnya (PPNPN)	27
Jumlah		79

Tabel II.2. Pegawai Berdasarkan Golongan



No.	JenisKelamin	PNS	PPNP
1.	Perempuan	19	10
2.	Pria	33	17
Jumlah		52	27

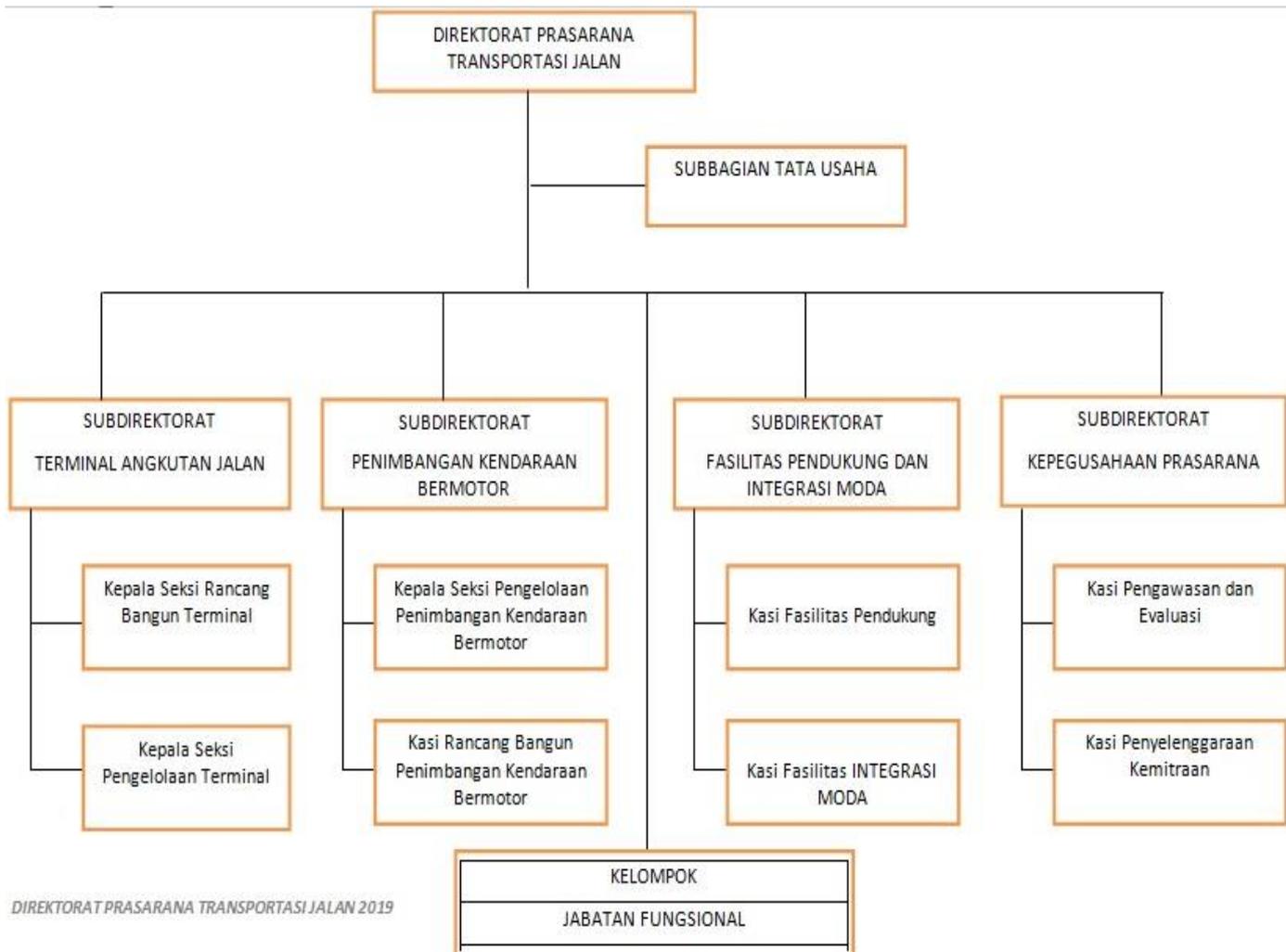
Tabel II.4. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Eselonering	2019
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	4
3.	Eselon IV	9
4.	Eselon V	-
Jumlah		14

Tabel II.5. Pegawai Berdasarkan Eselonering

Struktur Organisasi

Kerangka Kelembagaan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan



1.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan Potensi

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan kepada pemerintah daerah. Tugas dan fungsi dimaksud meliputi koordinasi kegiatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pemberian dukungan di bidang Transportasi Jalan, Potensi pengembangan pada bidang Transportasi Jalan adalah sebagai berikut :

- a. Dalam fenomena perkembangan globalisasi, tingkat pelayanan Transportasi Jalan akan terus diupayakan untuk memenuhi standar nasional maupun internasional sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global;
- b. Teknologi Transportasi Jalan akan berpengaruh terhadap kapasitas angkut, fleksibilitas pergerakan, kecepatan waktu tempuh, dan bentuk serta kehematannya dalam mengkonsumsi bahan bakar;
- c. Dengan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan melalui kebijakan deregulasi akan memungkinkan meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan dana investasi yang dibutuhkan bagi pembangunan infrastruktur Transportasi Jalan. Meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan pelayanan Transportasi Jalan akan memperluas jangkauan pelayanan dengan kualitas pelayanan yang makin baik;
- d. Dengan melakukan program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan maka akan meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dan akan mempermudah posisi Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa. Pembangunan Transportasi Jalan berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten, misalnya mewajibkan melakukan studi amdal sebelum masa konstruksi bagi setiap program pembangunan Transportasi Jalan yang telah disetujui pendanaannya. Selanjutnya dilakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pasca operasi secara berkala oleh lembaga-lembaga yang telah ada (Bapedal, Bapedalda atau lembaga teknis lainnya) baik di pusat maupun di daerah. Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam menangani masalah lingkungan dapat disinergikan menjadi kekuatan yang efektif untuk



melakukan pemantauan lingkungan sesuai dengan skala operasi obyek pemantauan lingkungan.

1.4.1. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan (Termasuk Ruang Lingkup)

Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe A

Sebelum ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dari 143 terminal penumpang tipe A yang wajib diserahterimakan pengelolaannya dari Pemerintah Kab/Kota kepada Pemerintah Pusat namun demikian sampai dengan posisi per Desember 2019 terdapat 97 (sembilan puluh tujuh) terminal yang telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) dan 46 (empat puluh enam) terminal yang belum dilaksanakan serah terima.



TERMINAL YANG SUDAH SELESAI BAST DI TAHUN 2019

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal
1	Provinsi NAD	Kota Banda Aceh	Terminal Batoh
2	Provinsi Banten	Kota Cilegon	Terminal Merak
3	Provinsi Banten	Kota Serang	Terminal Pakupatan
4	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Sumedang	Terminal Ciakar
5	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Subang	Terminal Subang
6	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Mangkang
7	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Terminal Bawen
8	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten. Pemalang	Terminal Induk Pemalang
9	Provinsi Jawa Tengah	Kota Pekalongan	Terminal Pekalongan
10	Provinsi Jawa Tengah	Kota Surakarta	Terminal Tirtonadi
11	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	Terminal Ir. Soekarno
12	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Cilacap	Terminal Gunung Simpung
13	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Banyumas	Terminal Purwokerto
14	Provinsi Jawa Tengah	Kabupaten Wonogiri	Terminal Giri Adipura
15	Provinsi Jawa Timur	Kota Malang	Terminal Arjosari
16	Provinsi NTB	Kota Mataram	Terminal Mandalika
17	Provinsi Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	Terminal Batu Ampar
18	Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Kubu Raya	Terminal Sie Ambawang
19	Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bitung	Terminal Tangkoko



TERMINAL YANG SUDAH SELESAI BAST DI TAHUN 2019

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal
1	Provinsi NAD	Kota Langsa	Terminal Langsa
2	Provinsi Sumatera Utara	Kota Pematang Siantar	Terminal Tanjung Pinggir
3	Provinsi Sumatera Barat	Kota Bukit Tinggi	Terminal Simpang Aur
4	Provinsi Riau	Kota Pekanbaru	Terminal Payung Sekaki
5	Provinsi Riau	Kabupaten Kampar	Terminal Bangkinang
6	Provinsi Riau	Kota Dumai	Terminal Dumai
7	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Terminal Karya Jaya
8	Provinsi Sumatera Selatan	Kota Palembang	Terminal Alang-Alang Lebar
9	Provinsi Sumatera Selatan	Kabupaten OKI	Terminal Kayuagung
10	Provinsi Lampung	Kota Bandar Lampung	Terminal Rajabasa
11	Provinsi Banten	Kabupaten Pandeglang	Terminal Labuan
12	Provinsi Banten	Kabupaten Lebak	Terminal Lebak
13	Provinsi Banten	Kota Serang	Terminal Pakupatan
14	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Kuningan	Terminal Kuningan
15	Provinsi Jawa Barat	Kota Cirebon	Terminal Harjamukti
16	Provinsi Jawa Barat	Kota Tasikmalaya	Terminal Indihiang
17	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Garut	Terminal Guntur Melati
18	Provinsi Jawa Barat	Kabupaten Karawang	Terminal Cikampek
19	Provinsi DI Yogyakarta	Kabupaten Gunungkidul	Terminal Dhaksinarga
20	Provinsi Jawa Tengah	Kota Semarang	Terminal Mangkang



--	--	--	--

TERMINAL YANG SUDAH SELESAI BAST DI TAHUN 2019

No	Provinsi	Kota/Kabupaten	Nama Terminal
21	Provinsi Jawa Tengah	Kota Salatiga	Terminal Tingkir
22	Provinsi Jawa Timur	Kabupaten Ngawi	Terminal Kertonegoro
23	Provinsi Bali	Kabupaten Badung	Terminal Mengwi
24	Provinsi NTB	Kota Bima	Terminal Dara
25	Provinsi Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	Terminal Gambut Barakat
26	Provinsi Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	Terminal W.A Gara
27	Provinsi Sulawesi Barat	Kabupaten Mamuju	Terminal Simbuang

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 853 tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Indonesia, terminal penumpang tipe A di atas telah ditetapkan sebagai lokasi terminal penumpang tipe A.

- 1) Tingkat pelayanan jalan, yang menyangga di lingkungan terminal kurang memadai secara fisik jalan, tidak efektif dan efisien sehingga menghambat proses perpindahan moda angkutan penumpang.
- 2) Aksesibilitas, terminal dengan simpul-simpul pergerakan masyarakat kurang terpadu sehingga tidak jarang didapati keengganan masyarakat maupun angkutan umum masuk ke dalam terminal.
- 3) Keamanan lingkungan sebagian besar terminal selama ini kurang mendukung bagi keamanan para pengguna jasa terminal, hal ini ditandai dengan maraknya aksi kejahatan seperti halnya pencopetan, pemalakan, dan premanisme sehingga mempengaruhi terhadap antusias pengunjung/penumpang menggunakan jasa pelayanan terminal.
- 4) Kenyamanan terminal yang belum terpenuhi sesuai harapan masyarakat pengguna



jasa terminal, tidak jarang ditemukan terminal yang kurang baik dalam mengelola kebersihan dan ketertiban wilayah kerja terminal serta tata letak/lay out terminal yang tidak menunjang bagi kenyamanan para calon penumpang.

- 5) Fasilitas penunjang terminal sering kali terabaikan beberapa terminal sudah ada yang menyediakan fasilitas-fasilitas penunjang seperti halnya fasilitas sosial, ibadah dan komersial. Namun fasilitas tersebut rata-rata terbengkalai dan kumuh karena tidak maksimal dalam pemeliharaan dan perawatannya.
- 6) Manajemen pengelolaan terminal belum sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku. Disamping itu kompetensi SDM pelaksana di lapangan belum sesuai kapasitasnya. Kegiatan perencanaan, pengembangan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap arus kendaraan umum yang masuk, parkir dan keluar dari terminal tidak teratur sehingga kinerja pelayanan terminal tidak berjalan dengan baik.

Namun demikian tidak semua kondisi terminal tipe A memiliki permasalahan seperti halnya di atas, di beberapa Pemerintah Daerah ada pula yang telah berjalan relatif baik. Dari kondisi permasalahan tersebut di atas, dengan pemindahan kewenangan pengelolaan terminal tipe A kepada Pemerintah Pusat secara bersamaan pula permasalahan-permasalahan dimaksud menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah pusat untuk menyelesaikannya

1.4.2. Penyelenggaraan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)

Sebagai tindak lanjut amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 141 UPPKB yang wajib diserahterimakan pengelolaannya dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat. Namun demikian sampai dengan posisi 31 Desember 2016 hanya terdapat 131 (seratus tiga puluh satu) UPPKB yang telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D), 4 (empat) UPPKB sisanya belum dilakukan serah terima dan 6 UPPKB tidak diserahkan, Adapun daftar rincian UPPKB sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut:



UPPKB YANG SUDAH DISERAHKAN KEPADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REKAPITULASI UPPKB
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



141
UPPKB

134

- 102 SUDAH REGISTER
- 16 PROSES PERALIHAN ASET KE KEMENKEU
- 16 PROSES VERIFIKASI ASET

✓
SUDAH SERAH TERIMA
OPERASIONAL

7

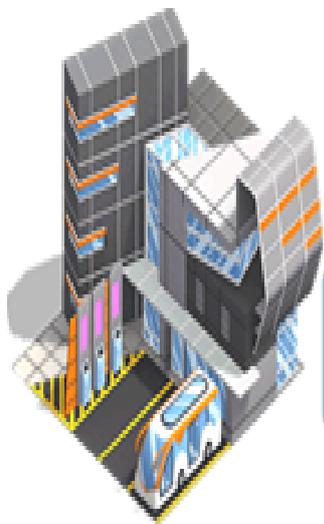
- 1 INVENTARISASI AWAL
- 6 TIDAK DISERAHKAN

🔍
BELUM SERAH TERIMA
OPERASIONAL



UPPKB YANG SUDAH DISERAHKAN KEPADA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REKAPITULASI UPPKB
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT



134
UPPKB
(SUDAH BAST)



REKAPITULASI UPPKB YANG BEROPERASI DAN TIDAK BEROPERASI

No	Provinsi	2017			2018			2019		
		Operasi (Buka)	Tidak Operasi (Tutup)	Jumlah	Operasi (Buka)	Tidak Operasi (Tutup)	Jumlah	Operasi (Buka)	Tidak Operasi (Tutup)	Jumlah
1	Aceh	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	Sumatera Utara	2	11	13	5	8	13	5	8	13
3	Sumatera Barat	1	8	9	2	7	9	4	5	9
4	Riau	1	2	3	1	2	3	2	1	3
5	Jambi	2	2	4	2	2	4	3	1	4
6	Bengkulu	1	1	2	1	1	2	1	1	2
7	Sumatera Selatan	3	2	5	4	1	5	0	5	5
8	Lampung	0	3	3	1	2	3	1	2	3
9	Kalimantan Timur	0	1	1	0	1	1	1	0	1
10	Kalimantan Selatan	0	2	2	0	2	2	1	1	2
11	Kalimantan Tengah	1	1	2	1	1	2	2	0	2
12	Kalimantan Barat	1	5	6	2	4	6	4	2	6
13	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jawa Barat	2	6	8	2	6	8	5	3	8
15	Jawa Tengah	2	12	14	5	9	14	7	7	14
16	DI Yogyakarta	1	2	3	1	2	3	3	0	3
17	Jawa Timur	4	16	20	4	16	20	10	10	20
18	Bali	1	1	2	1	1	2	1	1	2
19	Sulawesi Utara	1	3	4	1	2	3	2	1	3
20	Sulawesi Selatan	1	11	12	2	10	12	8	4	12
21	Sulawesi Tengah	0	4	4	1	3	4	3	1	4
22	Sulawesi Tenggara	0	1	1	1	0	1	1	0	1
23	Nusa Tenggara Barat	0	2	2	1	1	2	1	1	2
24	Nusa Tenggara Timur	0	2	2	1	3	4	1	3	4
25	Maluku	0	1	1	1	0	1	1	0	1
26	Papua	0	1	1	0	0	0	0	0	0
27	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gorontalo	0	2	2	1	1	2	2	0	2
29	Babel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Banten	0	3	3	1	2	3	2	1	3
31	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Sulawesi Barat	0	3	3	1	2	3	2	1	3
34	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		26	108	134	45	89	134	75	59	134



**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT NOMOR : SK.5857/AJ.005/DRJD/2018 TENTANG GPENETAPAN
PENGOPERASIAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR DI SELURUH INDONESIA**

- a) bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat perubahan penetapan pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di seluruh Indonesia.
- b) bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, diatur bahwa penutupan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dilakukan berdasarkan pertimbangan ketidaksesuaian penentuan lokasi dan penilaian kinerja pencapaian Standard Pelayanan Minimum;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang perubahan at
- d) as keputusan direktur jenderal perhubungan darat nomor: SK.5857/AJ.005/DRJD/2018 tentang penetapan pengoperasian unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di seluruh indonesia.

Sebanyak 9 UPPKB diantaranya dijadikan sebagai *Pilot Project* bekerjasama dengan PT. Sucofindo dan PT. Surveyor Indonesia, yaitu :

1. UPPKB Seumadam, Aceh
2. UPPKB Sarolangun, Jambi
3. UPPKB Senawar Jaya, Sumatera Selatan
4. UPPKB Losarang, Jawa Barat
5. UPPKB Wanareja, Jawa Tengah
6. UPPKB Widang, Jawa Timur
7. UPPKB Widodaren, Jawa Timur

1.4.3. Permasalahan Penyelenggaraan UPPKB

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan UPPKB, yaitu:

- 1) Kondisi Prasarana UPPKB yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam PM 134 Tahun 2015.
- 2) Keterbatasan jumlah SDM untuk operasional UPPKB baik dari sisi kuantitas maupun kualitas karena beberapa daerah tidak menyerahkan personil ke Kementerian Perhubungan.



- 3) Sistem penegakan hukum dan sanksi belum menimbulkan efek jera dan masih rentan terhadap penyalahgunaan (pungutan liar).
- 4) NSPK belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas dilapangan.
- 5) Pengawasan yang dilakukan masih bersifat manual sehingga kurang efektif maka perlunya dibangun suatu sistem pengawasan yang menggunakan teknologi informasi.

Berdasarkan kondisi permasalahan tersebut di atas, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan akan mencari langkah-langkah strategis demi terwujudnya pengelolaan UPPKB yang sesuai dengan slogannya yaitu “Jembatan Timbang Wow Semakin Pas dan Keren”.

1.4.4. Penyelenggaraan Kepengusahaan

Sebagai tindak lanjut amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan bahwa kewenangan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor beralih kewenangan dari Pemerintah Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dari keseluruhan Prasarana Transportasi Jalan tersebut belum dimaksimalkan pemanfaatannya sehingga dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara terdapat 5 (lima) bentuk skema pemanfaatan yaitu Pinjam Pakai, Sewa, Bangun Serah Guna (BGS) dan Bangun Guna Serah (BGS), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama dalam Penyediaan Infrastruktur (KSPI). Melalui skema pemanfaatan BMN yang ada diharapkan dapat mengoptimalkan BMN serta meningkatkan PNBP dengan tidak merubah tugas dan fungsi Kemterian/Lembaga.

Salah satu kendala yang ditemui dalam penyelenggaraan kepengusahaan adalah Kepemilikan aset Prasarana baik Terminal Tipe A maupun Unit Penyelenggara Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) belum tercatat dalam SIMAK BMN Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga proses kerjasama tidak dapat dilakukan karena terkendala Penetapan Status Penggunaan (PSP).

1.4.5. Permasalahan Keselamatan Transportasi Jalan

1. Ada dua hal yang dihadapi di dalam bidang transportasi, yaitu kemacetan dan keselamatan. Kemacetan terjadi di kota-kota besar di Indonesia, sedangkan kecelakaan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia;
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait dengan masalah keselamatan;



3. Belum lengkapnya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan keselamatan jalan;
4. Bidang keselamatan jalan belum mendapatkan perhatian yang lebih oleh pemerintah daerah sehingga program-program peningkatan keselamatan jalan belum berjalan dengan maksimal.

1.4.6. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. **BAB I PENDAHULUAN** memuat Penjelasan umum organisasi, Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan.
2. **BAB II PERENCANAAN KINERJA** memuat Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2019.
3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** memuat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
4. **BAB IV PENUTUP** memuat Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
5. **LAMPIRAN**
 - a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Lain-lain yang dianggap perlu.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

Jumlah kegiatan di Rencana Kinerja Tahun 2019 berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sebanyak **100 kegiatan** dengan Total Pagu Anggaran **Rp. 171.345.470.000. ,-**

II.1.Uraian Singkat Perencanaan Strategis Tahun 2019.

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	URAIAN		INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	%
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal	Lokasi	1	0	0
		2	Jumlah Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor online	Laporan	1	1	100%
		3	kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak ke-2	Laporan	1	1	100%
		4	Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Kota Pekanbaru	Lokasi	1	1	100%
		5	Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran	Lokasi	1	1	100%
2	Tersusunnya kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Terminal Tipe A	Laporan	3	3	100%
		2	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Laporan	7	7	100%
		3	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Laporan	6	6	100%
		4	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Kepegusahaan Prasarana	Laporan	2	2	100%
3	Terlaksananya Pengawasan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	2	2	100%
		2	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	2	2	100%
		3	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kegiatan	2	2	100%
		4	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	3	3	100%
4	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	1	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	1	1	100%
		2	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	1	1	100%
		3	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi	Kegiatan	1	1	100%
		4	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	1	1	100%





RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 dilihat dari Aplikasi e-Performance per Semester

LAPORAN CAPAIAN KINERJA DENGAN RENCANA AKSI

APLIKASI E-PERFORMANCE

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Tahun : 2019
Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Unit Eselon II : DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET PK TAHUN 2019			TW.II			TW.III			TW.IV			TARGET PK	CAPAIAN	CAPAIAN (%)
			TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)			(6)			(7)			(8)			(9)		
1	MENINGKATKANYA KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT																
	TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN	Unit	1	0	0	1	1	100	1	1	100	-	1	0	1	1	100
2	TERSUSUNYA KEBIJAKAN PRASARANA TRANSPORTASI JALAN																
	JUMLAH DOKUMEN KAJIAN TEKNIS PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	LAPORAN	1	0	0	1	1	100	1	1	100	-	1	0	11	1	9,09
3	PENGAWASAN PEMANTAUAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI																
	PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT	LAPORAN	1	0	0	1	1	100	1	1	100	-	1	0	4	1	25



II.2.PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA (PK) DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2019

Dokumen penetapan kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/dinas lain.

Adapun komponen penetapan kinerja meliputi :

Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada penetapan kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi.

Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen Perhubungan Darat yang menjadi tanggung jawab Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan dalam kelompok :

- a. Masukan (*Inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (*Outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;



- c. Hasil (*Outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*outputs*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (*impacts*) adalah ukuran tingkat pengaruh soial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh pencapaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Penetapan indikator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus terorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya :

- a. Spesifik dan jelas;
- b. Dapat diukur secara obyektif;
- c. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
- d. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.



**PERJANJIAN KINERJA (PK)
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2019**

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat	Jumlah Layanan Internal Organisasi	1. Belanja Keperluan Perkantoran	1	Kegiatan
			2. Peralatan Modal dan Mesin	1	Kegiatan
			3. Belanja Honorarium Output Kegiatan	1	Kegiatan
			4. Sewa Gedung Perkantoran	1	Tahun
			1. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR	1	Kegiatan
			2. Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri	1	Kegiatan
		Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Prasarana Transportasi Darat	1. Penyusunan LAKIP, LAPTAH, dan PK	1	Kegiatan
			2. Pembahasan RKA-KL Kemenhub Tahun 2020	1	Kegiatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2019
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target	
			Vol	Satuan
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan	1 Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan	9	Kegiatan
2	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Transportasi	2 Jumlah Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan	1	Lokasi
3	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	3 Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	4	Dokumen
4	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	4 Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	11	Laporan
5	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	5 Jumlah Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan	4	Laporan

Jumlah Anggaran

Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan

Rp. 160.587.624.000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT


Drs. BUDI SETYADI, SH, M.Si
NRP. 6205 0704

Jakarta, April 2019
DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN


MOHAMAD RISAL WASAL.ATD.MM.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target		KEGIATAN	Rencana Pelaksanaan				Panggung Jawab
			Vol	Satuan		TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan	1. Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan	9	Kegiatan	1. Pembahasan Penyusunan RKAKL Tahun 2020					TU
					2. Penyusunan LAKIP, LAPTAH, FK					TU
					3. Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat					TU
					4. Layanan Internal					TU
					5. Layanan Perawatan					TU
					6. Pengembangan Sistem Perimbangan Kendaraan Bermotor Online					UPPKB
					7. Kejasama Operasional UPPKB dengan Pihak ke II					UPPKB
					8. Pembangunan Jalur Khusus BRT di 5 (Lima) Kota Percontohan					FASPM
					9. Fasilitas Riset Area Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru					FASPM
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Prasarana Transportasi	2. Jumlah Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan	1	Lokasi	1. Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang (SBSN)					TAJ
3.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	3. Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	4	Dokumen	1. Dokumen Perencanaan Teknis Terminal					TAJ
					2. Dokumen Perencanaan Teknis Fasilitas Pendukung Integrasi Moda					FASPM
					3. Dokumen Perencanaan Teknis UPPKB					UPPKB
					4. Dokumen Perencanaan Teknis Subdt Bimbingan Kepengusahaan					KP
4.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	4. Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	11	Laporan	1. Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja UPPKB					UPPKB
					2. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan					FASPM
					3. Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri					TU
					4. Monitoring dan evaluasi Integrasi Moda Transportasi Jalan					FASPM
					5. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan					TAJ
					6. Evaluasi, Pengawasan dan penilaian Kinerja Prasarana Terminal Angkutan Jalara					TAJ
					7. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana yang akan di kerjasamakan					KP
					8. Monitoring Pekerjaan Perencanaan high and best used (Pendampingan Konsultan)					KP
					9. Monitoring Pelaksanaan pemanfaatan BMN Prasarana Perhubungan Darat					KP
					10. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peringkatan Fasilitas UPPKB					UPPKB
					11. Pendampingan Kurjungan Kerja Komisi V DPR RI					TU
5.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	5. Jumlah Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan	4	Laporan	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB					UPPKB
					2. Bimbingan Teknis Pengerahan Transit Oriented Development (TOD)					FASPM
					3. Sosialisasi Pemanfaatan BMN Prasarana Perhubungan Darat					KP
					4. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Keterlibatan, Kenyamanan Terminal Tipe A					TAJ

Jumlah Anggaran Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana Transportasi Jalan
Rp. 160.987.624.000

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Drs. KHUSNI SETIYADI, SH., M.Si
NIP. 6205 0784

Jakarta, April 2019

DIREKTUR PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

MUHAMMAD RISAL WASAL, ATD., MM.
Pembina Utama Muda (V/IIc)



DIREKTORAT

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Transportasi Jalan	1.a.	Jumlah Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan	Lokasi	1
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	2.a.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	Laporan	3
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3.a.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	Kegiatan	2
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4.a.	Jumlah Bimbingan Teknis untuk SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	Kegiatan	1

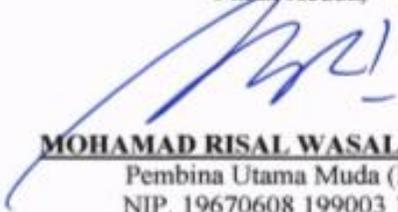
Kegiatan

1. Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang	Rp. 31.066.700.000,-
2. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Pare-Pare (Sulsel)	Rp. 500.000.000,-
3. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Pematang Siantar Sumut	Rp. 750.000.000,-
4. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi NAD (Lhoksumawe, Meulaboh, Takengon)	Rp. 1.000.000.000,-
5. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan	Rp. 800.000.000,-
6. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Angkutan Jalan	Rp. 300.000.000,-
7. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Ketertiban, Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A	Rp. 500.000.000,-

Anggaran

Rp. 31.066.700.000,-
Rp. 500.000.000,-
Rp. 750.000.000,-
Rp. 1.000.000.000,-
Rp. 800.000.000,-
Rp. 300.000.000,-
Rp. 500.000.000,-

Pihak Kedua,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005

Disetujui
Jakarta, April 2019
Pihak Pertama,


AHMADI ZB, ATD, SE, MM
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19660513 198903 1 001



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB DIREKTORAT TERMINAL ANGKUTAN JALAN**

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET		KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB
							T1 (5)	T2 (6)	T3 (7)	T4 (8)	
(1)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kapasitas Prasarana Transportasi Jalan	1.a.	Jumlah Pembangunan Prasarana Transportasi Jalan	1	Lokasi	1. Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang	✓	✓	✓	✓	Kasubdit Terminal Angkutan Jalan
2.	Tersusun Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	2.a.	Jumlah Dokumen kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	3	Laporan	1. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Pare-Pare (Sulsel)		✓	✓		Kasubdit Terminal Angkutan Jalan
						2. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Pematang Siantar Sumut		✓	✓		
						3. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi NAD (Lhoksumawe, Meulaboh, Takengon)		✓	✓		
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3.a.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	2	Kegiatan	1. Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Terminal	✓	✓	✓	✓	Kasubdit Terminal Angkutan Jalan
						2. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Angkutan Jalan	✓	✓	✓	✓	
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4.a.	Jumlah Bimbingan Teknis untuk SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1	Kegiatan	1. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Ketertiban, Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A		✓			Kasubdit Terminal Angkutan Jalan

Pihak Kedua,

MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, April 2019

Pihak Pertama,

AHMADI ZB, ATD, SE, MM

Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19660513 198903 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KEPALA SUB DIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Darat	1.a. Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan: 1. Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online 2. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Ke-2	Laporan	2
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	2.b. Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan: 1. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi) 2. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi) 3. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi) 4. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi) 5. Penyusunan FS Pembangunan UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah 6. Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah 7. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB Anjir Serapat dan UPPKB Tanjung Balik	Laporan	7
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3.c. Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja UPPKB;	Kegiatan	2



NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			2. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB		
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4.d	Jumlah Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB	Kegiatan	1

**Kegiatan Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor
Kegiatan**

	Anggaran
1. Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online	Rp. 8.000.000.000
2. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Ke-2	Rp. 90.000.000.000
3. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi)	Rp. 1.000.000.000
4. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi)	Rp. 1.000.000.000
5. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi)	Rp. 1.000.000.000
6. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi)	Rp. 1.000.000.000
7. Penyusunan FS Pembangunan UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 500.000.000
8. Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 800.000.000
9. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB Anjir Serapat dan UPPKB Tanjung Balik	Rp. 1.000.000.000
10. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja UPPKB	Rp. 500.000.000
11. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB	Rp. 344.600.000
12. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB	Rp. 982.096.000

Jakarta, 2019

Pihak Kedua,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM.
 Pembina Utama Muda, (IV/c)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Pihak Pertama,


Ir. MULYAHADI, MSTr
 Pembina Tk.I, (IV/b)
 NIP. 19660227 199103 1 001



RENCANA KINERJA TAHUNAN
KEPALA SUB DIREKTORAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Darat	1.a. Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan: 1. Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online 2. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Ke-2	Laporan	2
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	2.b. Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan: 1. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi) 2. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi) 3. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi) 4. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi) 5. Penyusunan FS Pembangunan UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah 6. Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah 7. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB Anjir Serapat dan UPPKB Tanjung Balik	Laporan	7
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3.c. Jumlah Monitoring dann Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja UPPKB;	Kegiatan	2



NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
			2. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB		
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4.d	Jumlah Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB	Kegiatan	1

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

KASUBDIT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB	
					T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Darat	a. Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan	2	Laporan	1. Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online		√	√	√	Kasubdit Penimbangan Kendaraan Bermotor
					2. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Ke-2		√	√	√	
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	b. Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	7	Laporan	1. Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah			√	√	
					2. Penyusunan Feasibility Study (FS) UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah	√	√	√		
					3. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB Anjir Serapat dan UPPKB Tanjung Balik	√	√	√		



NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN				PELAKSANA/ PENANGGUNG JAWAB
					T1	T2	T3	T4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				4. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi)	√	√	√		
				5. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi)	√	√	√		
				6. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi)	√	√	√		
				7. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi)	√	√	√		
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring, dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	c.	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	2 Kegiatan	1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja UPPKB	√	√	√	√
					2. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas UPPKB	√	√	√	√
4.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	d.	Jumlah Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1 Kegiatan	1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB	√	√	√	√

Pihak Kedua,

MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM.

Pembina Utama Muda, (IV/c)

NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, 2019

Pihak Pertama,



Ir. MULYAHADI, MSt

Pembina Tk.I, (IV/b)

NIP. 19660227 199103 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET	
1.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	1. a.	Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan	Lokasi	2
			1. Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Kota Pekanbaru	Lokasi	
2.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	2. a.	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Darat:	Laporan	6
			1. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda Provinsi Jawa Barat dan Banten	Laporan	
			2. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta	Laporan	
			3. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba	Laporan	
			4. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika	Laporan	
			5. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Labuan Bajo	Laporan	
3.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3. a.	Jumlah Monitoring Prasarana Transportasi Darat:	Kegiatan	2
			1. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan		
4.	Tersedianya ASN di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	4. a.	Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Prasarana Transportasi Darat:	Kegiatan	1
			1. Bimbingan Teknis Pengenalan Transit Oriented Development		

Pihak Kedua.


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Disetujui
 Jakarta, Juni 2019
 Pihak Pertama,


TITO GESIT UTJARTO, SE, DESS
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19650117 199003 1 003



**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
SUBDIREKTORAT FASILITAS PENDUKUNG DAN INTEGRASI MODA TAHUN 2019
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana/ Penanggung Jawab	
				T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Darat	Jumlah Dukungan Prasarana Transportasi Jalan	2	Kegiatan	1. Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Kota Pekanbaru					Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
				2. Penyediaan Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran					Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Darat	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	6	Laporan	1. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda Daerah Provinsi Jawa Barat dan Banten					Kasi Integrasi Moda Transportasi Jalan
				2. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda Daerah Provinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta					Kasi Integrasi Moda Transportasi Jalan
				3. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Danau Toba					Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
				4. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Mandalika					Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
				5. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Labuan Bajo					Kasi Integrasi Moda Transportasi Jalan
				6. Studi Penyusunan Kebutuhan Titik Lokasi dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Borobudur dan NYIA					Kasi Integrasi Moda Transportasi Jalan
Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan	Jumlah Monitoring Prasarana Transportasi Darat	2	Laporan	1. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan					Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan
				2. Monitoring dan Evaluasi Integrasi					Kasi Integrasi Moda



Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan					Moda Transportasi Jalan					Transportasi Jalan
Tersedianya ASN di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1	Kegiatan	1	Bimbingan Teknis Pengenalan Transit Oriented Development (TOD)					Kasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan

Jumlah Anggaran

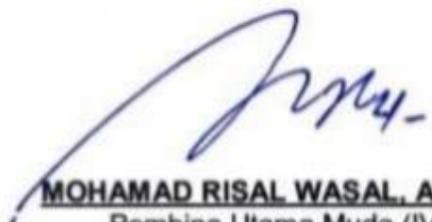
Kegiatan : Sub Direktorat Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

Rp. 8.951.782.000,-

Jakarta,

Juni 2019

Pihak Kedua,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD. MM
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19670608 199003 1 005

Pihak Pertama,


TITO GESIT UTIARTO, SE, DESS
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19650117 199003 1 003



RENCANA KINERJA TAHUNAN ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	1.a. Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan: 1. Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Tengah 2. Penyusunan Pra Studi Kelayakan/ <i>Outline Business Case</i> (OBC) KPBU Terminal Tipe A di Jawa Tengah	Laporan	2
2.	Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1.b. Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta 3. Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ	Kegiatan	3
3.	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	1.c. Jumlah Bimbingan Teknis Sosialisasi, dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan: 1. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepengusahaan	Kegiatan	1

Kegiatan Subdirektorat Kepengusahaan Prasarana Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
Kegiatan

1. Penyusunan Dokumen Pra FS, FS, SID, DED, Masterplan, dan Rencana Induk
2. Bimbingan Teknis Bidang Prasarana Transportasi Jalan
3. Tupoksi Bidang Prasarana Transportasi Jalan

Anggaran

Rp. 2.112.726.000
Rp. 600.000.000
Rp. 1.355.000.000

Pihak Kedua,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, Desember 2019

Pihak Pertama,


SUSANTY PERTIWI, SS, M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740720 199703 2 001



**RENCANA AKSI ATAS REVISI PERJANJIAN KINERJA
SUBDIREKTORAT KEPENGUSAHAAN PRASARANA TAHUN 2019
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan				Pelaksana/ Penanggung Jawab	
				T1	T2	T3	T4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Tersusunnya Kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan	2 Laporan	1	Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Tengah			√		Kasi Penyelenggaraan Kemitraan
			2	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/ <i>Outline Business Case</i> (OBC) KPBU Terminal Tipe A di Jawa Tengah				√	Kasi Pengawasan dan Evaluasi
Terlaksananya Pengawasan, Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Prasarana Transportasi Jalan	3 Kegiatan	1	Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan Dikerjasamakan	√	√	√	√	Kasi Penyelenggaraan Kemitraan
			2	Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta	√	√	√	√	Kasi Penyelenggaraan Kemitraan
			3	Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ	√	√	√	√	Kasi Pengawasan dan Evaluasi
Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	Jumlah Bimbingan Teknis Sosialisasi, dan Pelatihan Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1 Kegiatan	1	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepengusahaan		√	√	√	Kasi Pengawasan dan Evaluasi

Pihak Kedua,


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD. MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, Desember 2019

Pihak Pertama,


SUSANTY PERTIWI, SS, M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740720 199703 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
KASUBAG TATA USAHA
UNIT KERJA DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

NO	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Kinerja Pelayanan Prasarana Perhubungan Darat	Jumlah Layanan Internal Organisasi	1. Belanja Keperluan Perkantoran	1	Kegiatan
			2. Peralatan Modal dan Mesin	1	Kegiatan
			3. Belanja Honorarium Output Kegiatan	1	Kegiatan
			4. Sewa Gedung Perkantoran	1	Tahun
		Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Prasarana Transportasi Darat	1. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR	1	Kegiatan
			2. Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri	1	Kegiatan
		Jumlah Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Bidang Prasarana Transportasi Darat	1. Penyusunan LAKIP, LAPTAH, dan PK	1	Kegiatan
			2. Pembahasan RKA-KL Kemenhub Tahun 2020	1	Kegiatan



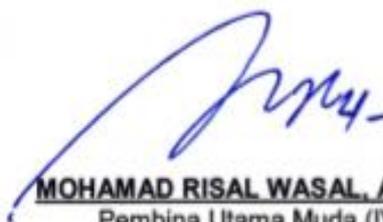
A. PROGRAM DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN yang telah ditetapkan, maka disusunlah program yang merupakan suatu kegiatan pokok yang menjadi dasar untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang direncanakan

Kegiatan	Anggaran
1. Belanja Keperluan Perkantoran	2.520.200.000
2. Peralatan Modal dan Mesin	1.529.960.000
3. Belanja Honorarium Output Kegiatan	197.820.000
4. Sewa Gedung Perkantoran	2.295.500.000
5. Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi V DPR	324.700.000
6. Koordinasi dan Kelembagaan Dalam Negeri	1.769.806.000
7. Penyusunan LAKIP, LAPTAH, dan PK	150.000.000
8. Pembahasan RKA-KL Kemenhub Tahun 2020	219.768.000
TOTAL	9,007,754,000

Jakarta, 5 Desember 2019

**DIREKTUR
PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**


MOHAMAD RISAL WASAL, ATD. MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670608 199003 1 005

**KASUBBAG TATA USAHA
PRASARANA TRANSPORTASI JALAN**


MUIHADI, S.Sos
Pejabat Tk. I (III/d)
NIP. 19620808 198403 1 001



Sebagai turunan dari kebijakan Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN. Adapun program-program tersebut antara lain:

- a) Pembangunan dan rehabilitasi Terminal;
- b) Pembangunan dan rehabilitasi UPPKB;
- c) Pembangunan dan peningkatan Bimbingan Kepengusahaan;
- d) Penyusunan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) di bidang Prasarana Transportasi Jalan.

B. KEGIATAN DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

Untuk mencapai program yang telah ditetapkan maka disusun berbagai kegiatan Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN tahun 2019, yang meliputi kegiatan-kegiatan yang ditampung pada DIPA Satker Direktorat PRASARANA TRANSPORTASI JALAN maupun yang ditampung pada DIPA Satker Hubdat di beberapa Provinsi, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Pembangunan Terminal Tipe A Anak Air Padang.
2. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Pare-Pare (Sulsel).
3. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Pematang Siantar Sumut.
4. Penyusunan DED Rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A Provinsi NAD (Lhoksumawe, Meulaboh, Takengon).
5. Monitoring Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan.
6. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan.
7. Evaluasi, Pengawasan, dan Penilaian Kinerja Prasarana Terminal Angkutan Jalan.
8. Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Ketertiban, Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A.
9. Pembangunan Jalur Khusus BRT di Kota Pekanbaru.
10. Penyediaan Fasilitas rest Area pada masa Angkutan Lebaran.
11. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda daerah Propinsi Jawa Barat dan Banten.
12. Penyusunan Feasibility Study Fasilitas Integrasi Moda daerah Propinsi Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta.
13. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pendukung Prasarana Transportasi Jalan.
14. Bimbingan Teknis Pengenalan Transit Oriented Development (TOD).
15. Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online.
16. Kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak Ke-2.
17. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi).



18. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Riau (2 Lokasi).
19. Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi).
20. Dokumen Andalalin UPPKB di Provinsi Sumatera Selatan (2 Lokasi).
21. Penyusunan FS Pembangunan UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah.
22. Penyusunan Masterplan dan DED UPPKB di Provinsi Kalimantan Tengah.
23. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Pembangunan UPPKB Anjir Serapat dan UPPKB Tanjung Balik.
24. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja UPPKB.
25. Monitoring
26. Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas UPPKB.
27. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan UPPKB.
28. Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal Tipe A di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.
29. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan dikerjasamakan.
30. Monitoring Pekerjaan Perencanaan High and Best used (Pendampingan Konsultan).
31. Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ.
32. Sosialisasi Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN
TAHUN 2019

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yg memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Idealnya pengukuran kinerja tahun berjalan akan menjadi lebih efektif jika dilakukan tiap bulan atau triwulan, dengan demikian informasi yang up to date mengenai hasil realisasi kinerja dari setiap IKU organisasi dapat diperoleh dengan lebih mudah. Dengan kata lain semakin sering dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap IKU akan diperoleh informasi lebih awal terkait capaian dan selanjutnya akan dilakukan tindakan yang nyata dalam rangka peningkatan kinerja yang akan dipertanggungjawabkan setelah tahun anggaran berakhir.

Penggunaan aplikasi e-Performance untuk memudahkan pelaksanaan monitoring agar dapat lebih intensif penggunaannya dan diharapkan sampai akhir tahun 2019, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan selaku unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah memanfaatkan sistem aplikasi tersebut ini secara optimal, sehingga dapat mengakomodir seluruh kepentingan unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi presiden. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.



III.2 Pengukuran Capaian Kinerja

Rumus yang digunakan dalam pengukuran dan perhitungan persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target PK}} \right) \times 100 \%$$

- 2) Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran capaian kinerja adalah :

- a) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target kinerja tahun 2019;
- b) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 terhadap target kinerja pada dokumen Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan
- c) Analisis penyebab ketercapaian/ketidaktercapaian kinerja;
- d) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 terhadap Target Kinerja Tahun 2019

Perbandingan target dan realisasi kinerja ini merupakan perbandingan capaian kinerja pada tahun 2019 dengan target kinerja tahun 2019. Untuk tahun 2015-2018 tidak dapat dibandingkan, Hal ini disebabkan karena IKK ini merupakan IKK yang ada pada unit organisasi baru di tahun 2019. Terdapat perbedaan indikator kinerja pada tahun 2016, 2017, dan 2018, dimana pada tahun 2019 terdapat perubahan unit organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga realisasi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tidak dapat dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tahun sebelumnya.



➤ **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 terhadap Target Kinerja Tahun 2019**
Selama tahun 2019, realisasi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan secara umum telah berhasil dicapai dengan baik. Hasil realisasi pada Tahun 2019 yaitu sebesar **87.16%**. Hasil capaian ini diperoleh melalui perbandingan antara nilai total realisasi dan target seluruh sasaran program di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019.

➤ **Capaian Kinerja**

Tingkat capaian kinerja Unit Kerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat diketahui setelah dilakukan pengukuran kinerja terhadap setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran Kinerja didefinisikan sebagai proses sistematis untuk menginventarisir, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektifitas suatu instansi/organisasi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dibebankan. Hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target kinerja selanjutnya disebut pencapaian kinerja.

Capaian kinerja Sasaran Program (SP) unit kerja AKUNTABILITAS KINERJA dicapai melalui :

- a. Identifikasi IKU pada setiap SP, dimana setiap SP minimal memiliki satu IKU;
- b. Setiap IKU dilakukan pengukuran capaian kinerjanya (dalam %) melalui perbandingan realisasi dengan targetnya; dan
- c. Nilai capaian kinerja setiap IKU dihitung berdasarkan capaian kinerja setiap kelompok kegiatan yang telah dilakukan guna mencapai SP dimaksud.

Tingkat capaian kinerja setiap SP merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok IKU yang menunjukkan kinerja SP dimaksud, sama halnya dengan nilai/tingkat capaian kinerja suatu IKU merupakan nilai rata-rata capaian dari kelompok kegiatan yang mendukung IKU dimaksud. Pada dokumen Laporan Kinerja Tahun 2020 ini tidak hanya menampilkan capaian kinerja pada tahun 2020, dengan tetap mengacu pada Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 45 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



Secara rinci capaian kinerja masing-masing sasaran program dijabarkan sebagai berikut :

NO	URAIAN		INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	%
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal	Lokasi	1	0	0
		2	Jumlah Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor online	Laporan	1	1	100%
		3	kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak ke-2	Laporan	1	1	100%
		4	Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Kota Pekanbaru	Lokasi	1	1	100%
		5	Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran	Lokasi	1	1	100%
2	Tersusunnya kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Terminal Tipe A	Laporan	3	3	100%
		2	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Laporan	7	7	100%
		3	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Laporan	6	6	100%
		4	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Kepegusahaan Prasarana	Laporan	2	2	100%
3	Terlaksananya Pengawasan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	2	2	100%
		2	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	2	2	100%
		3	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kegiatan	2	2	100%
		4	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	3	3	100%
4	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	1	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	1	1	100%
		2	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	1	1	100%
		3	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi	Kegiatan	1	1	100%
		4	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	1	1	100%



III.3. ANALISIS EFISIENSI

Analisis Efisiensi dilihat dari Pagu Anggaran Tahun 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	%	PAGU	REALISASI DALAM ANGGARAN	CAPAIAN %
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal	Lokasi	1	0	0	31.066.700.000	9.757.815.358	31.41%
2	Jumlah Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor online	Laporan	1	1	100%	9.388.940.000	9.388.940.000	100%
3	kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak ke-2	Laporan	1	1	100%	78.776.645.000	78.776.645.000	100%
4	Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Kota Pekanbaru	Lokasi	1	1	100%	26.750.000.000	26.750.000.000	100%
5	Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran	Lokasi	1	1	100%	1.750.000.000	1.750.000.000	100%
1	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang	Laporan	3	3	100%	21.239.416.000	20.554.097.500	96.77%
2	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Laporan	7	7	100%	5.548.173.000	5.548.173.000	100%
3	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Laporan	6	6	100%	2.875.045.000	2.969.790.500	103.30%
4	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Kepegusahaan Prasarana	Laporan	2	2	100%	2.112.726.000	2.081.602.600	98.53%



III.4. ANALISIS EFISIENSI

Analisis Efisiensi dilihat dari Jenis Kegiatan Tahun 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	%	PAGU	REALISASI DALAM ANGGARAN	CAPAIAN %
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
1	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	2	2	100%	424.396.000	411.459.864	96.95%
2	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	2	2	100%	247.652.000	247.603.336	99.98%
3	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kegiatan	2	2	100%	448.547.000	448.306.175	99.95%
4	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	3	3	100%	391.770.000	390.945.773	99.79%
1	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	1	1	100%	102.014.000	101.920.988	99.91%
2	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Penimbangan Kendaraan	Kegiatan	1	1	100%	376.525.000	338.410.000	89.88%
3	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi	Kegiatan	1	1	100%	49.450.000	49.450.000	100%
4	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	1	1	100%	279.070.000	279.000.000	99.97%

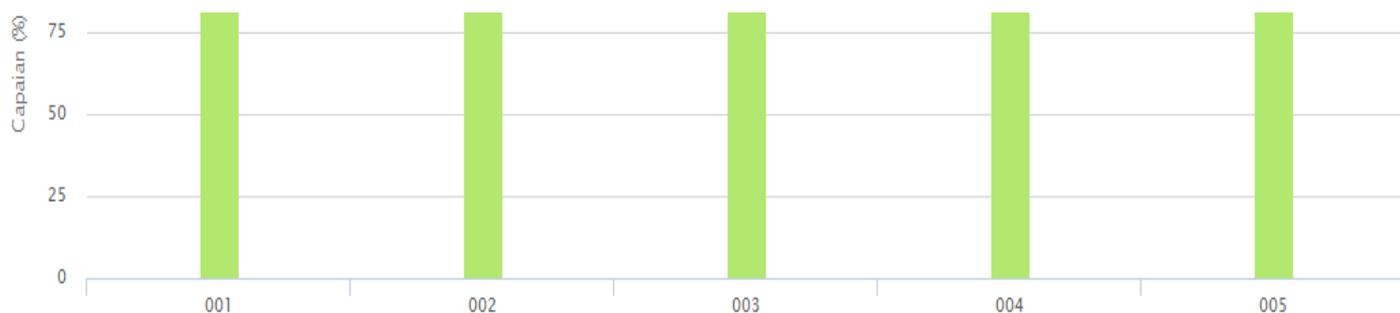


ANALISIS DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

III.5. Analisis Efisiensi

Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

dilihat dari Aplikasi e-Performance pertarget Bulanan



No	IKK	Satuan	Target	Capaian	Capaian(%)
1	001 - TERWUJUDNYA PELAYANAN TRANSPORTASI YANG HANDAL, BERDAYA SAING DAN MEMBERIKAN NILAI TAMBAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS NASIONAL DAN PENINGKATAN ANGKUTAN PERKOTAAN	Unit	1	1	100
2	002 - TERWUJUDNYA SARANA TRANSPORTASI DARAT YANG BERKESELAMATAN	Lokasi	1	1	100
3	003 - JUMLAH DOKUMEN KAJIAN TEKNIS PRASARANA TRANSPORTASI DARAT	LAPORAN	11	11	100
4	004 - PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PRASARANA PERHUBUNGAN DARAT	LAPORAN	4	4	100
5	005 - JUMLAH DESERTA RIMBINGAN TEKNIS RENCANA PRASARANA	LAPORAN	1	1	100

2016 © Kementerian Perhubungan Republik Indonesia



III.6. CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja dilihat dari indikator Keuangan e-monitoring / Span.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah melaksanakan Indikator Kinerja dengan baik, dengan **capaian kinerja rata-rata 87,16 %**.

Rincian analisis pencapaian kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019 dilakukan dengan melihat pencapaian kinerja sebagai berikut:

CAPAIAN KINERJA				
CAPAIAN KINERJA MELALUI APLIKASI e-MONITORING DALAM PERSENTASE KEUANGAN				
NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	% Keuangan
1	Belanja Pegawai	-	-	0
2	Belanja Barang	82.189.147.000	82.054.448.224	99,84%
3	Belanja Modal	89.156.323.000	67.294.315.328	75,48%
	Total Anggaran	171.345.470.000	149.348.763.552	87,16%
	Persentase	100%	87,16%	

NO	JENIS BELANJA	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE	KETERANGAN
1	JANUARI	1.121.681.000	-	0 %	Alert
2	FEBRUARI	4.440.505.000	-	0 %	Alert
3	MARET	6.571.033.000	844.387.746	12,85 %	Alert
4	APRIL	8.105.880.000	1.717.828.465	21,19 %	Alert
5	MEI	8.487.576.000	2.879.297.237	33,92 %	Alert
6	JUNI	9.887.318.000	808.117.330	8,17 %	Alert
7	JULI	16.807.573.000	7.677.456.720	45,68 %	Alert
8	AGUSTUS	17.737.870.000	4.064.726.908	22,92%	Alert
9	SEPTEMBER	19.725.064.000	10.987.632.189	55,70 %	Alert
10	OKTOBER	17.889.554.000	31.289.944.648	174,91 %	Excellent
11	NOVEMBER	21.472.079.000	41.202.953.063	191,89%	Excellent
12	DESEMBER	39.099.337.000	47.876.419.247	122,45 %	Excellent
	TOTAL	171.345.470.000	149.348.763.553	87,16 %	On Track



Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan menggambarkan anggaran yang disediakan untuk Indikator Kinerja Khusus dan realisasi penggunaan anggaran tersebut. Secara umum anggaran digunakan secara efisien, yang digambarkan dari :

- a. Pelaksanaan kegiatan (*output*) dapat tercapai sesuai target ($\geq 100\%$), dan
- b. Realisasi anggaran kurang dari 100% atau efisiensi anggaran lebih dari 100%.



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			
Kegiatan		Anggaran	
1.	Pembangunan Anak Air Padang (SBSN) (Termasuk Supervisi).	Rp.	41.194.400.000,-
2.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A leuwipanjang	Rp.	25.000.000.000,-
3.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Harjamukti, Cirebon	Rp.	20.000.000.000,-
4.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Mangkang, Semarang	Rp.	40.000.000.000,-
5.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Purwokerto, Banyumas	Rp.	25.000.000.000,-
6.	Peningkatan/Revitalisasi Terminal Penumpang Tipe A Tirtonadi, Kota Surakarta	Rp.	40.000.000.000,-
7.	Pengadaan Weight in Motion (WIM) dan fasilitas pendukung UPPKB	Rp.	4.700.000.000,-
8.	Pengembangan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor Online	Rp.	3.200.000.000,-
9.	Pengadaan Perangkat Sistem Monitoring Penunjang Kinerja UPPKB	Rp.	9.010.414.000,-
10.	Pengadaan Alat Survei Monitoring UPPKB	Rp.	135.928.000,-
11.	Kerjasama Operasional UPPKB Pihak ke-2	Rp.	60.000.000.000,-
12.	Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di 4 Lokasi KSPN	Rp.	26.750.000.000,-
13.	Fasilitas Rest Area pada masa Angkutan Lebaran	Rp.	1.750.000.000,-
14.	Penyusunan Pedoman Rancang Bangun Terminal Penumpang	Rp.	1.123.000.000,-
15.	Penyusunan Teknis Pengembangan Simpul Terminal Barang	Rp.	849.000.000,-



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

16.	Penyusunan Dokumen SID Terminal Penumpang Tipe A Lamandau	Rp.	1.000.000.000,-
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			
Kegiatan			Anggaran
17.	Penyusunan Dokumen FS Terminal Barang Internasional Sambas, Kalbar	Rp.	1.000.000.000,-
18.	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan UPPKB di Provinsi Maluku dan Provinsi NTT	Rp.	1.000.000.000,-
19.	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan UPPKB di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat	Rp.	1.000.000.000,-
20.	Penyusunan Pedoman Rancang Bangun UPPKB	Rp.	950.000.000,-
21.	Penyusunan Feasibility Study Pembangunan UPPKB di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu	Rp.	1.000.000.000,-
22.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Tanjung Kelayang	Rp.	500.000.000,-
23.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Morotai	Rp.	500.000.000,-
24.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Wakatobi	Rp.	500.000.000,-
25.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Bromo Tengger Semeru	Rp.	500.000.000,-
26.	Studi Penyusunan Kebutuhan Titik dan DED Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di KSPN Tanjung Lesung	Rp.	500.000.000,-



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

27.	Penyusunan Kajian Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda di Terminal Terpadu Merak	Rp.	750.000.000,-
28.	Kajian Sistem Transportasi Terintegrasi di Kota Palembang	Rp.	750.000.000,-
Direktorat Prasarana Transportasi Jalan			
Kegiatan			Anggaran
29.	Penyusunan Rencana Teknis dan DED Fasilitas Integrasi Moda Transjateng (Kawasan Kedung Sepur)	Rp.	750.000.000,-
30.	Penyusunan Kajian Teknis Pembangunan Fasilitas Integrasi Moda di Terminal Leuwi Panjang, Jawa Barat	Rp.	750.000.000,-
31.	Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal di Jawa Timur	Rp.	920.000.000,-
32.	Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal di Kalimantan	Rp.	1.022.000.000,-
33.	Penyusunan Studi Pendahuluan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Terminal di Sumatera	Rp.	995.000.000,-
34.	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan	Rp.	2.358.000.000,-
35.	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan	Rp.	1.837.000.000,-
36.	Penyusunan Pra Studi Kelayakan/Outline Business Case (OBC) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan	Rp.	1.768.000.000,-



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

37.	Penyusunan Dokumen Lingkungan Proyek KPBU Pembangunan Proving Ground BPLJSKB Bekasi	Rp.	1.100.000.000,-
38.	Penyusunan Project Management Unit (PMU) Kegiatan Prasarana Jalan	Rp.	1.000.000.000,-
39.	Survey dan Monitoring Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun;	Rp.	250.000.000,-
	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan		
	Kegiatan		Anggaran
41.	Monitoring, Evaluasi dan penilaian kinerja UPPKB;	Rp.	500.000.000,-
42.	Monitoring Pelaksanaan Identifikasi Pembangunan Terminal Angkutan Jalan;	Rp.	600.000.000,-
43.	Monitoring dan Evaluasi Integrasi Moda;	Rp.	500.000.000,-
44.	Monitoring Dan Evaluasi Fasilitas Pendukung;	Rp.	500.000.000,-
45.	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas;	Rp.	270.772.000,-
46.	Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana Yang Akan Dikerjasamakan;	Rp.	500.000.000,-
47.	Monitoring Perencanaan UPPKB;	Rp.	218.732.000,-
48.	Monitoring Pelaksanaan Pemanfaatan BMN Prasarana LLAJ;	Rp.	300.000.000,-
49.	Dukungan Dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU;	Rp.	500.000.000,-
50.	Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta;	Rp.	300.000.000,-
51.	Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI;	Rp.	500.000.000,-
52.	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan;	Rp.	800.000.000,-



Tabel 3.4. Pengukuran output kegiatan

53.	Evaluasi, Pengawasan, Penilaian Kinerja dan Operasional Terminal Barang;	Rp.	300.000.000,-
54.	Kontingensi Bencana dan Tanggap Darurat;	Rp.	250.000.000,-
55.	Monitoring Operasional Terminal Tipe A.	Rp.	500.000.000,-
56.	Bimbingan Teknis Peraturan Fasilitas Pendukung Dan Integrasi Moda;.	Rp.	500.000.000,-
	Direktorat Prasarana Transportasi Jalan		
	Kegiatan		Anggaran
57.	Pembahasan RKA KL Tahun 2021	Rp.	208.268.000,-
58.	Sosialisasi Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan;	Rp.	400.000.000,-
59.	Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelenggaraan UPPKB;	Rp.	1.199.999.000,-
60.	Bimbingan Teknis Pelayanan Ketertiban, Kenyamanan Terminal Penumpang Tipe A;	Rp.	500.000.000,-
61.	Semiloka Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda di Kawasan KSPN;	Rp.	250.000.000,-
62.	Belanja Keperluan sehari-hari Direktorat;	Rp.	750.000.000,-
63.	Peralatan Modal dan Mesin;	Rp.	650.440.000,-
64.	Belanja Honorarium Output Kegiatan	Rp.	143.520.000,-
65.	Sewa Gedung Perkantoran;	Rp.	2.000.000.000,-
66.	Belanja Sewa	Rp.	620.000.000,-
	Jumlah anggaran kegiatan Satker Direktorat Prasarana Perhubungan Darat	Rp.	339.240.513.000



Analisis Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

A. Analisis Kinerja Kegiatan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah melaksanakan Indikator Kinerja dengan baik, Dengan **Capaian Kinerja rata-rata 87.16 %**

- 1) Sararan I (Pertama) adalah dalam rangka terwujudnya kinerja pelayanan Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019 melalui kegiatan dengan hasil kinerja :

Gambar 1.a Analisis Kinerja sasaran I

NO	URAIAN		INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	%
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Lokasi Pembangunan Terminal (Terminal Anak Air Provinsi padang)	Lokasi	1	0	0
		2	Jumlah Pembangunan Sistem Penimbangan Kendaraan Bermotor online	Laporan	1	1	100%
		3	kerjasama Operasional UPPKB dengan Pihak ke-2	Laporan	1	1	100%
		4	Pembangunan Fasilitas Pendukung BRT di Kota Pekanbaru	Lokasi	1	1	100%
		5	Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran	Lokasi	1	1	100%

Pada indikator ini, hasil kerja (Realisasi) 87.16% ada 1 Kegiatan yang tidak terlaksana antara lain :

- Pembangunan SBSN Terminal Anak Air Provinsi Sumatera Barat (Padang). Dikarenan masih dalam proses Lelang.

- 2) Sararan II (kedua) adalah dalam rangka tersusunya Kebijakan Dokumentasi kinerja pelayanan Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019 melalui kegiatan dengan hasil kinerja :

Gambar 2.a Analisis Kinerja sasaran II

NO	URAIAN		INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	%
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Tersusunnya kebijakan Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Terminal Tipe A	Laporan	3	3	100%
		2	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Laporan	7	7	100%
		3	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Laporan	6	6	100%
		4	Jumlah Dokumen Kajian Teknis Prasarana Transportasi Jalan Bidang Kepegusahaan Prasarana	Laporan	2	2	100%

Pada Indikator ini, hasil Kerja (Realisasi) mencapai 100%.



- 3). Sararan III (ketiga) adalah dalam rangka terlaksananya Pengawasan Monitoring kinerja pelayanan Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019 melalui kegiatan dengan hasil kinerja :

Gambar 3.a Analisis Kinerja **sasaran III**

NO	URAIAN		INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	%
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Terlaksananya Pengawasan Pemantauan Monitoring dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan	1	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	2	2	100%
		2	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	2	2	100%
		3	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda	Kegiatan	2	2	100%
		4	Jumlah Monitoring dan Evaluasi di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	3	3	100%

Pada Indikator ini, hasil Kerja (Realisasi) mencapai 100%, dan Terlaksana.

- 4). Sararan IV (Empat) adalah dalam rangka Memenuhi SDM dibidang Prasarana Transportasi Jalan yang berkualitas dan kopenten maka didakan diklat pelayanan Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019 melalui kegiatan dengan hasil kinerja :

Gambar IV.a Analisis Kinerja **sasaran IV**

NO	URAIAN		INDIKATOR	SATUAN	VOLUME	REALISASI	%
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Tersedianya SDM di Bidang Prasarana Transportasi Jalan yang Kompeten dan Profesional	1	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Terminal Angkutan Jalan	Kegiatan	1	1	100%
		2	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Penimbangan Kendaraan Bermotor	Kegiatan	1	1	100%
		3	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang Fasilitas Pendukung dan Integrasi	Kegiatan	1	1	100%
		4	Jumlah Bimbingan Teknis Untuk SDM di Bidang kepegusahaan Prasarana	Kegiatan	1	1	100%

Pada Indikator ini, hasil Kerja (Realisasi) mencapai 100%, dan Terlaksana.



C. USULAN PERBAIKAN

Saran agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem pelaksanaan kegiatan yaitu melalui :

- a. Perlunya perencanaan yang lebih matang dan jelas dalam menyusun rencana anggaran, untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang akan terjadi;
- b. Perlunya peningkatan koordinasi di dalam internal institusi terkait dengan pelaksanaan dan perubahan rencana anggaran.



BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Berdasarkan data realisasi dari masing-masing indikator kinerja diperoleh hasil pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan Pendanaan (realisasi dan efisiensi) dan Keluaran (*Output*) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang disusun berdasarkan pengelompokan sasaran sebagai berikut :

1. Dalam rangka terwujudnya Prasarana Transportasi Jalan yang berkeselamatan, 2 (dua) kegiatan dengan capaian kinerja efisiensi anggaran realisasi anggaran 87.16% dan capaian kinerja rata-rata 100%;

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Renstra tahun 2015-2019, yakni merupakan pelaksanaan tahun keempat, dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan Tahun 2019 ini secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik;
2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan senantiasa meningkatkan koordinasi baik dengan Pemerintah Daerah dan Instansi terkait lainnya agar dapat lebih meningkatkan kinerja menuju Pemerintahan yang akuntabel.
3. Hambatan-hambatan yang sering ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan berimplikasi pada pencapaian target sasaran, untuk selanjutnya harus direduksi dengan perencanaan, penjadwalan dan persiapan pelaksanaan kegiatan yang lebih baik.



BAB V
LAMPIRAN

- 1. Dokumentasi kegiatan Per Subdit Dit Prasarana Transportasi Jalan.**
- 2. Perjanjian Kinerja Dit Prasarana Transportasi Jalan 2019**
- 3. Revisi Perjanjian Kinerja Dit Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2019**
- 4. Lain-lain yang dianggap perlu**

